

**PENDIDIKAN MASYARAKAT DI DAERAH 3T
(TERTINGGAL, TERDEPAN DAN TERLUAR):
KEBIJAKAN, KURIKULUM, KEPENDIDIKAN**

Ikhwan Nur Rois¹, Depi Kurniati²

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta,

² Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

roisnur04@gmail.com¹, depi.kurniati07@gmail.com²

DOI: <https://doi.org/10.24071/snfkkip.2021.26>

Abstrak

Pendidikan menjadi hal penting diperoleh masyarakat guna meningkatkan kualitas generasi bangsa Indonesia yang baik terkhusus di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Pendidikan dalam prosesnya memerlukan kurikulum guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pemerintah telah memperhatikan terkait pendidikan masyarakat di daerah tersebut dengan mengeluarkan program SM3T dan masyarakat tersebut harus memiliki pemerataan akses kependidikan dan kesesuaian kurikulum. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, adapun metode yang digunakan ialah kajian pustaka elektronik (*e-library research*) dengan pendekatan sosiologis. Teknik penyajian data dengan dokumentasi. Teknik analisis data serta penarikan kesimpulan dengan tiga langkah, yaitu: *editing*, *organizing* dan inferensi. Hasil penelitian ini akan membahas terkait kebijakan, kurikulum dan kependidikan berupa kesetaraan pada proses pembelajaran di masyarakat 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

Kata Kunci: kebijakan, kurikulum, masyarakat 3T, pendidikan

Pendahuluan

Pendidikan sangat menjadi perkara yang sangat penting untuk diperoleh pada setiap individual para generasi penerus bangsa, terkhusus bangsa Indonesia. Para generasi penerus bangsa jika memperoleh pendidikan secara baik maka akan terciptanya dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia, sehingga pendidikan sebagai upaya nyata dan sistematis guna mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan membuat peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi atau bakat pada dirinya dengan tujuan agar memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang baik, serta keahlian yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Depdiknas, 2003). Maka dari itu, pendidikan suatu kewajiban yang harus diperoleh bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Adapun pendidikan di Indonesia yang wajib diperoleh ialah selama sembilan tahun atau jenjang sekolah dasar selama 6 tahun dan jenjang sekolah menengah pertama selama 3 tahun yang mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa di kemudian hari.

Pendidikan yang ada di Indonesia ini hendaknya dapat meluas dan merata di segala daerah yang ada, baik dari Sabang hingga Merauke, terkhusus pada daerah

tertinggal, terdepan dan terluar yang berada di Indonesia. Menurut data terakhir pada tanggal 1 Juli 2020, Negara Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 7.810.000.000 Km² yang terdiri kurang lebih sebanyak 17.499 pulau. Adapun rincian total luas wilayah tersebut terbagi menjadi dua bagian: luas lautan dan luas daratan dengan rincian sebagai berikut; luas lautan di Indonesia sekitar 3.250.000.000 Km² dan luas daratan sekitar 2.550.000.000 Km² (Pratama, 2020). Jumlah pulau yang ada tersebut pendidikan diharuskan agar dapat diperoleh oleh masyarakat Indonesia, terkhusus pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau dikenal dengan daerah 3T.

Daerah 3T tersebut sangat diutamakan dan diperhatikan dalam kebutuhan pendidikan bagi masyarakat yang berada di daerah tersebut. Pendidikan yang diberikan pada daerah 3T di Indonesia harus memiliki suatu panduan atau kurikulum tertentu yang mana kurikulum itu hendaknya berlandaskan pada budaya di setiap daerah 3T, hal ini disebabkan karena tidak bisa disamakan dengan daerah yang di luar daerah 3T tersebut dan kurikulum yang dirancang harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

Permasalahan terkait Pendidikan di daerah 3T yang bisa dilihat ialah kurangnya distribusi tenaga pendidik atau guru di daerah 3T. Kurangnya tenaga pendidik disebabkan karena jumlah tenaga pendidik masih sedikit dan keberadaan tenaga pendidik tersebut yang belum merata di daerah 3T, sehingga membuat pemerintah menyadari kebutuhan pendidikan di masyarakat daerah tersebut. Bentuk perhatian pemerintah Indonesia dalam hal menangani permasalahan pendidikan di daerah 3T dengan menyelenggarakan suatu program yaitu Program Sarjana Mendidik di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar atau dikenal dengan program SM3T guna mencetak para tenaga pendidik yang profesional dan siap ditempatkan dan mengabdikan pada daerah-daerah tertinggal, terdepan atau terluar di Indonesia.

Program SM3T ini merupakan salah satu kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia ini dilaksanakan pada tingkat perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri, yang mana tidak semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia akan tetapi hanya pada 17 perguruan tinggi negeri, diantaranya: UPI Bandung, UNJ, UNY, UNNES, UNP, UNIMED, UNESA, UM, UNDIKSHA, UNM, UNIMA, UNG, FKIP UNSYIAH, FKIP UNMUL dan FKIP UNTAN. Program SM3T tersebut semoga kebutuhan pendidikan masyarakat di daerah 3T dapat baik dan merata, baik segi kurikulum, kebijakan dan kependidikan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis lebih membahas pendidikan yang ada di daerah 3T dengan 3 sektor, yaitu: kurikulum, kebijakan dan kependidikan. Penulis berharap dengan yang ditulis pada artikel ini dapat menjadi referensi dan sumber data untuk penelitian selanjutnya terkhusus pada kajian daerah 3T di Indonesia.

Metode

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, adapun metode yang digunakan ialah kajian pustaka elektronik (*e-library research*) dengan pendekatan sosiologis. Penulis memilih jenis, metode dan pendekatan tersebut dikarenakan penelitian ini bersifat kajian pustaka yang mana penulis lakukan kajian pustaka secara online dan sesuai dengan keadaan sosial yang terjadi menurut pengamatan penulis. Teknik penyajian data dengan dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data berupa file

atau dokumentasi yang didapatkan secara online. Adapun teknik analisis data serta penarikan kesimpulan dengan tiga langkah, yaitu: *editing*, *organizing* dan inferensi (Mathew B. Miles, 1984).

Hasil dan Pembahasan

Artikel ini membahas terkait pendidikan masyarakat di daerah 3T secara teoritis, yang mana terbagi menjadi tiga pembahasan, yaitu: 1) Kurikulum, 2) Kebijakan dan 3) Kependidikan.

Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar

a. Definisi Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar

Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar atau yang dikenal dengan daerah 3T ini merupakan sejumlah daerah saja yang ada di Indonesia. Ketiga daerah tersebut dapat dikategorikan sebagai daerah yang khusus karena daerah tertinggal, terdepan atau terluar ini dikarenakan memiliki syarat khusus tersendiri, diantaranya: a) sistem ekonomi masyarakat yang rendah, b) sumber daya manusia yang kurang, c) sarana dan prasarana yang tidak memadai, d) sistem keuangan daerah yang kurang stabil, e) jalur akses menuju daerah yang sulit dan f) ciri khas daerah (HAM, 2015).

Oleh karena itu, yang tergolong daerah 3T hanya beberapa kabupaten di Indonesia. Hal ini dikarenakan daerah 3T setidaknya harus terpenuhi antara keenam syarat khusus tersebut, jika tidak ada salah satu keenam syarat tersebut maka belum bisa dikatakan daerah tertinggal, terdepan ataupun terluar di wilayah Indonesia.

b. Wilayah Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar

Berikut rincian pembagian provinsi dan kabupaten untuk daerah 3T: (Firman, 2020)

Tabel 1. Provinsi dan Kabupaten Daerah 3T

No	Provinsi	Kabupaten Daerah
1		Nias
2	Sumatera Utara	Nias Barat
3		Nias Selatan
4		Nias Utara
5		Mentawai
6	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara
7	Lampung	Pesisir Barat
8	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara
9		Alor
10		Belu
11		Kupang
12		Lembata
13		Malaka
14		Manggarai Timur
15	Rote Ndao	
16	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua
17		Sumba Barat

18		Sumba Barat Daya
19		Sumba Timur
20		Sumba Tengah
21		Timor Tengah Selatan
22		Donggala
23	Sulawesi Tengah	Sigi
24		Tojo Una-una
25		Buru Selatan
26		Kepulauan Aru
27		Maluku Barat Daya
28	Maluku	Maluku Tenggara Barat
29		Seram Bagian Barat
30		Seram Bagian Timur
31	Maluku Utara	Kepulauan Sula
32		Pulau Taliabu
33		Manokwari Selatan
34		Maybrat
35		Pegunungan Arfak
36		Sorong
37	Papua Barat	Sorong Selatan
38		Tambrauw
39		Teluk Bintuni
40		Teluk Wondama
41		Asmat
42		Boven Digoel
43		Deiyai
44		Dogiyai
45		Intan Jaya
46		Jayawijaya
47		Keerom
48	Papua	Lanny Jaya
49		Mamberamo Raya
50		Mamberamo Tengah
51		Mappi
52		Nabire
53		Nduga
54		Paniai
55		Pegunungan Bintang
56		Puncak

57	Puncak Jaya
58	Supiori
59	Tolikara
60	Waropen
61	Yahukimo
62	Yalimo

Kurikulum

a. Definisi Kurikulum

Kurikulum merupakan sebuah perangkat perencanaan dan peraturan yang memuat isi, tujuan serta metode dan strategi yang tersusun dan disesuaikan dengan kebutuhan tujuan pembelajaran (Hamdi, 2017). Pertama kali kurikulum muncul di Skotlandia pada tahun 1892 dan diresmikan oleh Amerika Serikat pada satu abad setelahnya. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani dengan dua kata yaitu *curir* (pelari) dan *curere* (tempat berlomba), sehingga dapat diartikan bahwa kurikulum adalah jarak tempuh yang dibutuhkan seorang pelari dalam sebuah arena lomba. (Wahyuni, 2015) Adapun secara terminologi, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus di tempuh dan dituntaskan siswa untuk memperoleh ijazah atau suatu tingkatan pendidikan.

Kurikulum juga diartikan sebagai suatu rancangan tertulis yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran (Ansyar, 2017). Eisner dalam Zaunuri menjelaskan tentang fungsi kurikulum sebagai pedoman dan acuan bagi para pendidik dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kurikulum juga berperan sebagai acuan dalam pengawasan belajar siswa di rumah. Peran kurikulum diantaranya sebagai pedoman yang akan membantu terwujudnya kegiatan belajar-mengajar di sekolah (Zainuri, 2018). Setiap kurikulum yang dipersiapkan agar peserta didik dapat aktif mengikuti proses pembelajaran dan turut berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bisa disimpulkan mengenai kurikulum dalam tiga konteks, yaitu (1) sebagai sebuah rancangan yang dibuat untuk menjadi acuan dan pedoman dalam proses pembelajaran di sekolah, (2) sebagai pengalaman belajar sejumlah mata pelajaran di sekolah, (3) sebagai kegiatan belajar siswa yang dilakukan di bawah pengawasan guru baik di dalam maupun di luar sekolah. (Mudlofir, 2012).

Di Indonesia tercatat ada 10 kurikulum yang pernah digunakan diantaranya: kurikulum 1947, kurikulum 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum edisi revisi 1999, kurikulum 2004, KTSP 2006 dan kurikulum 2013 atau K13 (Matdoan, 2020). Kurikulum memuat empat aspek penting berupa tujuan, materi/isi, organisasi, dan evaluasi. (Baderiah, 2018) *Pertama*, komponen tujuan yaitu aspek yang sangat fundamental karena memberikan arah pada semua aspek program pendidikan. Tujuan pendidikan meliputi empat tingkatan, yaitu: tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikulum dan instruksional. *Kedua*, komponen materi. Materi merupakan pengetahuan, nilai-nilai, keahlian, dan sikap yang terorganisir pada mata pelajaran di sekolah. Agar

setiap tujuan pembelajaran yang direncanakan dapat tercapai, maka diperlukan bahan ajar yang relevan dengan tujuan kurikulum. *Ketiga*, komponen organisasi. Adanya perbedaan antara belajar di rumah dan di sekolah, maka diperlukan sebuah pengorganisasian secara formal di sekolah. Organisasi kurikulum merupakan susunan materi, baik pra-pembelajaran hingga pasca pembelajaran. *Keempat*, komponen evaluasi pembelajaran ini merupakan unsur yang sangat penting dilakukan guna mengetahui sejauh mana keberhasilan dan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah direncanakan.

Adapun kurikulum untuk masyarakat di daerah 3T hendaknya tetap bisa menjalankan keempat komponen kurikulum tersebut, akan tetapi dapat disesuaikan kebutuhan masyarakat setempat, berbasis budaya dan berorientasi pada ketahanan hidup di daerah 3T.

b. Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan di Daerah 3T

Kurikulum dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua kategori, yaitu pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah dan tingkat kelas. Kurikulum di tingkat sekolah ini langsung ditangani oleh kepala sekolah. Selain bertugas mendesain kurikulum agar terlaksana, kepala sekolah juga berperan sebagai penanggungjawab dalam menyusun kegiatan sekolah, seperti membuat kalender akademik untuk satu tahun atau dua semester, menyusun jadwal mata pelajaran mingguan, mengatur tugas dan kewajiban guru serta hal-hal lainnya berkenaan dengan tujuan kurikulum yang telah direncanakan. Adapun kurikulum di tingkat kelas ini langsung ditugaskan dan dibagikan kepada guru kelas maupun guru mata pelajaran. Pembagian tugas ini diantaranya meliputi proses belajar mengajar, membina kegiatan ekstrakurikuler sebagai penunjang minat bakat siswa diluar cakupan kurikulum, dan membimbing kegiatan pembelajaran dalam rangka memajukan potensi diri siswa serta membantu siswa untuk memecahkan permasalahan. (Huda, 2017) Adapun pelaksanaan kurikulum di daerah 3T sangat memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak. Di antara langkah yang bisa dilakukan agar tujuan kurikulum di daerah 3T bisa tercapai adalah dengan menerapkan model sekolah kebangsaan.

Model sekolah kebangsaan ialah salah satu cara yang bisa ditempuh dan diterapkan di daerah 3T guna meningkatkan kesejahteraan pendidikan masyarakatnya, karena dengan sekolah kebangsaan bisa menjadi wadah untuk menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan mengenai kebenaran pancasila sebagai ideologi bangsa serta pandangan hidup berbangsa, menanamkan rasa cinta tanah air serta rasa rela berkorban untuk bangsa dalam menuju generasi bangsa yang baik. Sekolah kebangsaan ini merupakan sebuah proses pembelajaran yang memuat tentang semangat kebangsaan, mengembangkan eksistensi Indonesia, pengembangan kompetensi dan berbudaya bhineka tunggal ika yang berkarakter yang perlu dimiliki oleh masyarakat di daerah 3T. (Asriati, 2017).

Pembelajaran pada model sekolah kebangsaan ini memuat tentang pembelajaran *living history* dengan nilai perjuangan, *life skill*, pendidikan karakter, kewirausahaan, bela negara serta *soft skill*. Cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan pembelajaran *living history* adalah dengan

mengaitkan antara materi pelajaran dengan contoh kehidupan secara nyata yang terjadi di daerah 3T tersebut agar siswa mendapat gambaran yang lebih hidup dengan pembelajaran yang sesuai dengan konteks siswa, membuat kunjungan langsung ke sumber sejarah dan melakukan studi kasus berkenaan dengan aspek di lingkungan sekitar peserta didik tinggal. Model pembelajaran ini, bisa mengubah pola kurikulum yang ada di daerah 3T. Model pembelajaran ini menonjolkan aspek kebudayaan lokal sehingga bisa dijadikan sebagai sebuah proses pembelajaran yang layak dalam upaya meningkatkan mutu sekolah di daerah 3T.

Kebijakan

a. Definisi Kebijakan

Kebijakan diartikan sebagai serangkaian rencana program, keputusan atau sikap untuk bertindak maupun tidak dan sebagai tahapan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, yang mana kebijakan ini dilakukan oleh para pemegang kebijakan. (Abdullah Ramadhani, 2017)

Kebijakan terdapat dua jenis (Thoha, 2012), yakni: a) kebijakan merupakan praktika sosial. Oleh karena itu, kebijakan jenis ini ialah suatu upaya yang dihasilkan oleh pemerintah dengan berdasarkan dari segala kejadian di masyarakat. Kejadian itu muncul dalam praktika kehidupan kemasyarakatan di masyarakat. b) kebijakan merupakan responasi sosial. Oleh karenanya kebijakan ini suatu jawaban atas kejadian peristiwa di masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antar masyarakat atau pihak yang terlibat dan menciptakan intensif atas tindakan tersebut bagi para pihak yang terlibat dan mendapatkan keadilan atas perlakuan yang tidak rasional.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap permasalahan sesuatu dirasa sangat penting, hal ini dikarenakan bahwa segala kegiatan hendaknya berlandaskan kepada kebijakan pemerintah, salah satunya kebijakan pendidikan masyarakat untuk daerah 3T tersebut, yang mana pemerintah telah dikeluarkan dan ditetapkan dengan program SM3T. Kebijakan pendidikan tersebut bertujuan agar masyarakat di daerah 3T bisa menikmati proses pembelajaran yang layak guna terciptanya generasi penerus bangsa yang baik dan profesional.

b. Kebijakan Terhadap Pendidikan di Daerah 3T

Kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka pemerataan pendidikan masyarakat di daerah 3T dengan beberapa program pendidikan, diantaranya ialah Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM3T), Program Diklat Berjenjang bagi Pendidik PAUD, Program Sertifikasi Keahlian Ganda bagi Guru SMA/SMK, Program Guru Garis Depan (GGD), Program Pemberian Subsidi Bantuan Pendidikan Konversi GTK PAUD dan DIKMAS. (Kemendikbud, 2017)

Berbagai macam kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud RI tersebut, pada artikel ini membahas satu program yaitu: Program SM3T.

Program SM3T ini merupakan salah satu program pemerintah dibawah kendali Kemendikbud RI, program ini serupa dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di tingkat perguruan tinggi. Adapun perbedaannya program SM3T ini dibawah kendali Kemendikbud RI, adapun program KKN dibawah kendali Universitas atau Institut atau Sekolah Tinggi atau Akademik tertentu. Selain itu juga program SM3T ini tidak mengeluarkan biaya karena program SM3T biaya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, adapun program KKN ini mengeluarkan biaya yang lumayan karena biaya ditanggung oleh peserta dan instansi tertentu.

Program SM3T ini memiliki keuntungan tersendiri diantaranya; a) Program resmi dari pemerintah Indonesia, b) Mendapatkan beberapa fasilitas, yaitu: *fee* (biaya) dan sertifikat, c) Dapat melanjutkan pada program-program pemerintah, diantaranya Profesi Pengembangan Guru (PPG), Program Guru Garis Depan (GGD) dan Program SILN (Sekolah Indonesia Luar Negeri), d. Lebih memahami adat istiadat di tempat kegiatan program SM3T yang telah ditentukan.

Program SM3T ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1) Membantu daerah 3T untuk meningkatkan kualitas pendidikan, 2) Melaksanakan kegiatan pengabdian di masyarakat agar terciptanya sikap profesional dalam memecahkan masalah pendidikan di daerah 3T, 3) Menumbuhkan rasa cinta tanah air, bela negara, peduli, empati dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa di bidang pendidikan; 4) Menciptakan *life skill* dan *soft skill* di daerah 3T, 5) Meningkatkan kecintaan terhadap profesi guru yang bertugas di daerah 3T, 6) Mempersiapkan calon pendidik yang profesional. Adapun peserta program SM3T ini memiliki tugas sebagai berikut: 1) Melaksanakan tugas mengajar pada satuan pendidikan sesuai dengan bidang keahlian dan tuntutan kondisi di daerah setempat, 2) Menciptakan kegiatan inovasi pembelajaran di sekolah maupun diluar sekolah, 3) Melakukan kegiatan ekstrakurikuler dengan berbasis budaya setempat, 4) Membantu meningkatkan manajemen pendidikan di sekolah agar lebih baik dan tertata, 5) Berinteraksi sosial secara baik dengan kepala suku, desa setempat dan berkerjasama dengan masyarakat untuk mendukung program pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah 3T.

Kependidikan

a. Definisi Kependidikan

Kependidikan berasal dari kata pendidikan yang berimbuhan *ke-an* sehingga memiliki arti segala sesuatu yang dapat berhubungan dengan pendidikan, baik tenaga pendidik, guru, akses pendidikan dan elemen-elemen pendidikan lainnya. Adapun pembahasan poin kependidikan pada artikel ini hanya seputar akses pendidikan.

b. Akses pendidikan Terhadap Pendidikan di Daerah 3T

Akses pendidikan merupakan salah satu penunjang suksesnya berjalannya program SM3T di daerah 3T. Akses pendidikan masih belum merata dan meluas hingga saat ini, hal ini dibuktikan masih ada 62 daerah yang tergolongkan sebagai daerah 3T. Oleh karena itu, akses pendidikan harus bisa merata dan meluas diberikan pada daerah 3T tersebut, beberapa

upaya agar akses pendidikan dapat merata dan meluas sebagai berikut: (Hutagaol, 2017)

Pertama, peningkatan keuangan masyarakat. Penyebab tidak meratanya pendidikan pada generasi penerus bangsa ialah ketidakmampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya, disisi lain pola pikir masyarakat daerah 3T di Indonesia sebagian besar agar dapat bertahan hidup, sehingga pendidikan di daerah tersebut mengalami kendala. Karenanya pemerintah perlu terlebih dahulu meningkatkan keuangan masyarakat setempat. Jika pendapatan masyarakat di daerah 3T meningkat tentu mereka memilih anaknya untuk menikmati dunia pendidikan formal. **Kedua**, menciptakan pendidikan yang sesuai dengan budaya masyarakat di daerah 3T. Pemerintah tidak semestinya membuat kebijakan untuk pendidikan di daerah 3T dan luar daerah 3T. Hal ini bisa dilakukan dengan menempatkan guru yang bersedia mengabdikan untuk pendidikan anak-anak di daerah tertentu saja untuk ini pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan mereka. **Ketiga**, peningkatan bahan bacaan anak-anak di daerah 3T, salah satunya ialah buku. Buku merupakan media pembelajaran terpenting dalam proses belajar-mengajar. Karenanya diperlukan ketersediaan perpustakaan di seluruh unit sekolah, terkhusus pada daerah 3T. Ketersediaan buku yang memadai akan membantu guru dalam memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengisi waktu luangnya dengan membaca buku.

Akses kependidikan untuk daerah 3T sangat erat kaitannya dengan syarat khusus dikategorikan sebagai daerah 3T diatas, oleh karenanya agar kualitas pendidikan di daerah 3T berjalan baik hendaknya memerhatikan pemerataan akses kependidikan ini, disisi lain juga memperhatikan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan guna meningkatkan pendidikan di daerah 3T lebih baik dan juga kurikulum yang berbasis budaya setempat. Sehingga daerah-daerah 3T yang ada di Indonesia mutu dan kualitas pendidikan masyarakatnya semakin baik dan bagus.

Kesimpulan

Pendidikan masyarakat di daerah 3T sangat membutuhkan perhatian khusus baik dari pemerintah dan masyarakat setempat. Pendidikan di daerah 3T tersebut juga memperhatikan tiga sektor, yaitu: kurikulum, kebijakan dan kependidikan, sehingga diharapkan dapat lebih memperhatikan kembali terhadap kebutuhan pendidikan di daerah 3T, agar terciptanya generasi penerus bangsa yang baik dan profesional dikemudian hari. Semoga artikel ini dapat memberikan penjelasan bagi penelitian selanjutnya terhadap pendidikan ataupun daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

Daftar Pustaka

- Abdullah Ramadhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik, Vol. 11 No. 01*, 1-12.
- Ansyar, M. (2017). Kurikulum Hakikat, Fondasi, Desain dan Pengembangan. Jakarta: Kencana.
- Asriati, N. (2017). Pembangunan Model Pendidikan Menengah "Sekolah Kebangsaan" di Daerah 3T dan Sempadaan Kalimantan Barat Sarawak

- Malaysia. *International Research Journal of Education and Sciences (IRJES)*, Vol. 1 Special Issue 1 (Malay), 43-50.
- Baderiah. (2018). *Buku Ajar Pengembangan Kurikulum*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Depdiknas. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20*. Jakarta.
- Firman. (2020, Mei 11). *Ini Daerah Tertinggal Menurut Perpres*. Retrieved April 13, 2021, from www.kemendesa.go.id: <https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3261/ini-daerah-tertinggal-menurut-perpres>.
- HAM, M. H. (2015, Januari 21). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*.
- Hamdi, M. M. (2017, Oktober). *Konsep Pengembangan Kurikulum. INTIZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 1, Nomor 1*, 1-13.
- Huda, N. (2017). *Manajemen Pengembangan Kurikulum. Jurnal Manajemen Pengembangan Kurikulum*, 52-75.
- Hutagaol, N. M. (2017, Juni 5). *Akses Pendidikan, Masalah dan Solusi*. Retrieved April 13, 2021, from www.medanbisnisdaily.com: <https://medanbisnisdaily.com/news/read/2017/06/05/302633/akses-pendidikan-masalah-dan-solusi/>.
- Kemendikbud. (2017, November 25). *Kemendikbud Siapkan Lima Program Afirmasi untuk Pemenuhan Guru di Daerah*. Retrieved April 13, 2021, from www.kemdikbud.go.id: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/11/kemendikbud-siapkan-lima-program-afirmasi-untuk-pemenuhan-guru-di-daerah#:~:text=Program%20SM3T%20adalah%20program%20pengabdian,d daerah%203T%20selama%20satu%20tahun>.
- Matdoan, M. N. (2020, September). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 pada Satuan Pendidikan di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis, Vol. 1 No. 2*, 153-177.
- Mathew B. Miles, M. H. (1984). *The Qualitative Research's Companion*. California: Sage Publications.
- Mudlofir, A. (2012). *Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Pratama, O. (2020, Juli 01). *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*. Retrieved April 13, 2021, from *Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut*: <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyuni, F. (2015). *Kurikulum dari Masa Ke Masa (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia)*. *Al-Adabiya, Vol. 10 No. 2*.
- Zainuri, A. (2018). *Konsep Dasar Kurikulum Pendidikan*. Palembang: Noer Fikri.